@alfianakbarbalyanan
KERJA UNTUK RAKYAT

AAB
AAB CENTER

LAPORAN KINERJA

Rangkuman Kegiatan
Anggota DPRK Mimika
Tahun 2024-2025



Alfian Akbar Balyanan

Ketua Komisi I DPRD Kab. Mimika

Pusat Diminta Tinjau Efisiensi Dana OTSUS

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Mimika dari PDI Perjuangan, Alfian Akbar Balyanan, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang ikut memangkas dana otonomi khusus (Otsus) untuk Papua.

Menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus yang mengatur alokasi dana sebesar 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional untuk kabupaten atau kota di seluruh Papua.

“Terkait pemangkasan dana Otsus, kami kurang sependapat karena itu berkaitan dengan amanat Undang-Undang Otsus terkait dengan dana 2,25 persen dari DAU yang wajib diberikan kepada kabupaten atau kota di seluruh tanah Papua,” ujar Alfian, Senin (17/2/2025).

Alfian menegaskan, pemangkasan dana Otsus sama saja dengan pemerintah melanggar kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Otsus. Ia mengingatkan bahwa dana tersebut sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

“Apabila ada pemangkasan itu, maka sama saja pemerintah telah melanggar kebijakan sendiri yang dituangkan dalam Undang-Undang Otsus,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan



dana Otsus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Diberitakan sebelumnya, pagu dana otonomi khusus (Otsus) Kabupaten Mimika tahun 2025 ikut kena pangkas akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Dana Otsus Mimika sebelumnya sebesar Rp230.03 miliar, kena pangkas Rp7.02 miliar. Kini dana Otsus Mimika hanya Rp192.992 miliar.

Dana ini dikelola oleh 21 OPD dan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, penanganan stunting dan pengadaan rumah layak huni masyarakat asli Papua. (Faris).

Sumber: https://papua60detik.id/berita/anggota-dprk-mimika-kritik-kebijakan-pemangkasan-dana-otsus



AKD DPRK Mimika Terbentuk: Alfian Akbar Balyanan Ketua Komisi I, Dolfin Beanal Ketua Komisi II, Herman Gafur Komisi III, Dan Elinus Balinol Mom Ketua Komisi IV

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Mimika akhirnya resmi ditetapkan dalam Rapat yang digelar di Hotel Aston di Jayapura, pada Senin (14/4/2025) yang dipimpin oleh Wakil ketua II Karel Gwijangge,S.IP dan Wakil ketua III, Ester Tsenawatme.

Sesuai informasi yang diperoleh dari Wakil Ketua II DPRK Mimika, Karel Gwijangge bahwa AKD DPRK Mimika terdiri dari empat Komisi, ditambah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan Badan Kehormatan Dewan (BKD) resmi ditetapkan.

Alfian Akbar Balyanan,SH sebagai Ketua Komisi 1 (F-PDI Perjuangan), Wakil ketua Daud Bunga,SH (F-Gerindra), Anton Pali,SH sebagai Sekretaris (F-Nasdem). Ketua Komisi II, Dolfin Beanal (F-Gerindra), Wakil Ketua Mariunus Tandiseno (F-Golkar), Adrian Andhika Thie,Sst,Par (F-PDI-Perjuangan).

Ketua Komisi III Herman Gafur,SE (Fraksi Rakyat Bersatu-PBB), Adolf Omaleng Wakil ketua (F-Golkar), Herman Tangke Pare (F-Demokrat) sebagai Sekeretaris Komisi III. Ketua Komisi IV, Elinus B Mom (F-Gerindra), Wakil ketua Ancelina Beanal (F-Demokrat), Yulis Dice Amisim sebagai Sekretaris Komisi IV (F-PKB).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), H. Iwan Anwar,SH, MH (F-Golkar), Wakil Ketua Luther Beanal (F-Otsus). Ketua Badan Kehoramatan (BK), Ester Rika Agustinas Komber dan Wakil Ketua Anton Pali,SH (F-Eme Neme Yauware-Nasdem).

Karel Gwijangge ketika dikonfirmasikan wartawan di Jayapura, membenarkan telah terbentuknya AKD DPRK Mimika. Ia mengatakan proses pemilihan AKD dilakukan secara demokratis sesuai mekanisme tata tertib DPRK, dan hasilnya telah ditetapkan melalui rapat pleno.

Karel mengaku, pembahasan AKD dilakukan di Jayapura berjalan lancar dan telah sesuai proses dan mekanisme melalui pemungutan suara secara internal dan hasilnya juga disahkan dalam pleno. Dirinya berahrap, setelah kegiatan ini, DPRK Mimika akan segera menjadwalkan rapat paripurna internal untuk pengesahan secara resmi hasil penetapan AKD.

“DPRK akan segera menyampaikan laporan hasil pleno ini kepada pimpinan dewan dan menjadwalkan paripurna internal pekan depan, setelah libur Paskah,”sebutnya ketika dikonfirmasikan dari Jayapura, Senin (14/4/2025).

Dengan adanya komposisi AKD dari Komisi, Bapemperda hingga BK, kiranya dapat memperkuat kinerja DPRK Mimika dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Sumber: https://taparemimika.com/index.php/2025/04/14/akd-dprk-mimika-terbentuk-alfian-akbarbalyanan-ketua-komisi-1-dolfin-beanal-ketua-komisi-ii-herman-gafur-komisi-iii-dan-elinus-balinol-momketua-komisi-iv/

Kegiatan Orientasi DPRD oleh BPSDA Provinsi Papua



Sebanyak 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika periode 2024-2029 mengikuti kegiata Orientasi atau pembekalan tentang tugas-tugas pokok dan fungsi bagi anggota DPRD Mimika dalam menjalankan tugasnya selama lima tahun kedepan.

Sebagai Unsur dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis berkaitan dengan bidang legilasi,budgeting/anggaran dan pengawasan, maka orientasi ini sangat penting untuk memantapkan kompetensi Anggota Dewan pada level yang memadai agar dapat melaksanakan tugas secara optimal merumuskan dalam dan mengimplementasikan berbagai kebijakan daerah untuk meningkatkankesejahteraan rakyat.

Adapun sasaran kegiatan orientasi bagi anggota DPRD Mimika meliputi delapan hal diantaranya, soal wawasan kebangsaan, Sistem pemerintahan Indonesia, Penguatan dan Penegakan Peraturan perundang-undangan, Tata Tertib DPRD< Fungsi, tugas dan wewenang serta alat kelengkapan DPRD, Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan, Hak dan Kewajiban anggota DPRD dan kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang energy, ekonomi, dan pangan, global security problem, environmental ethics and human solidarity.

Sumber: https://taparemimika.com/index.php/2024/12/05/35-anggota-dprd-mimika-periode-2024-2029-ikut-kegiatan-orientasi-dan-pembekalan-tentang-tupokasi/

Komposisi SKPD Mimika Perlu disesuaikan Dengan Kabinet Merah Putih



Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika – Papua suaikan dengan Kabinet Merah Putih Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Nomenklatur kementerian dibawa pimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo – Gibran ditambah, seperti Pendidikan dan Kebudayaan yang dulunya satu, tapi sekarang dipisahkan yakni Pendidikan sendiri, Kebudayaan sendiri, kurang lebih sekitar 53 kementerian.

“Kalau kita dalam konteks di Kabupaten Mimika itu masih belum terlalu relevan kita punya komposisi SKPD dengan nomenklatur di kementerian. Makanya saya berharap di pelantikan di Bupati terpilih nanti pasca putusan MK perlu ada pembenahan dan melakukan Reformasi birokrasi,”ungkap Anggota DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan,SH pada wartawan, Senin (17/2/2025).

Lanjut kata Politisi PDI Perjuangan, Alfian Akbar bahwa Pembenahan yang perlu dilakukan adalah bagaimana nomenklatur SKPD ini disesuaikan dengan nomenklatur Kementerian. Dengan tujuan supaya komunikasi dan lainya bisa berjalan secara efektif dan efisien, termasuk lobi lobi soal kegiatan program.

“Kita berharap supaya kita tidak hanya mengharapkan APBD dalam proses pembangunan di Kabupaten Mimika tapi juga kita bisa mengakses APBN semaksimal mungkin untuk menunjang kesejahteraan di Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Misalnya seperti Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, knapa tidak dipisahkan?. “Tidak apa apa kita kasih gemuk SKPD tapi kita juga memperkuat fungsinya, Supaya pelayanan bisa maksimal.

Hal ini perlu kita dorong supaya ada keselarasanlah antara nomenklatur dengan program yang dicanangkan oleh setiap Dinas.

Sumber: https://www.timikabisnis.com/komposisi-skpd-mimika-perlu-disesuaikan-dengan-kabinet-merah-putih/

Kepemimpinan Strategis Menuju Mimika Maju

Kepemimpinan Kepala Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Kepemimpinan tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif untuk menyelaraskan seluruh agenda pembangunan bagi daerah.

Guna mewujudkan kepemimpinan strategis perlu didukung melalui penguatan sistem pemerintahan daerah yang mampu mengartikulasi visi besar yang dicanangkan Kepala Daerah.

Untuk itu, perlu dilakukan tranformasi pemerintahan secara sistemik dan massif agar mendukung terwujudnya perubahan yang signifikan. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan menggalakkan agenda reformasi birokrasi.

Dimulai dengan, pertama; melakukan penataan birokrasi melalui penyelarasan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kementerian/lembaga ditingkat Pusat, yang tentu hal ini berkonsekuensi terhadap pemisahan sejumlah nomenklatur OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.

Kemudian kedua, Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi kinerja terhadap sejumlah pimpinan OPD yang dianggap tidak berkompeten dalam mengeksersais agenda yang ditetapkan Kepala Daerah.

Selain itu, perlu untuk melakukan sejumlah pembenahan terhadap proses seleksi (lelang / job fit) pada pimpinan OPD sehingga Pimpinan OPD yang terpilih adalah merupakan produk terbaik yang dapat mendukung kinerja Kepala Daerah.

Terkahir yang ketiga, perlunya membangun budaya yang bersih dan berprinsip meritokrasi dalam rangka membangun budaya baru yang lebih inklusif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian tatkala Kepala Daerah telah memiliki perangkat yang berkompeten maka sesungguhnya kerja-kerja strategis guna mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Mimika bukan lagi hal yang mustahil dilakukan, oleh karena telah terciptanya iklim tata kelola pemerintahan telah kondusif dan siap menopang visi dan misi Kepala Daerah menuju Mimika Maju.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/kepemimpinan-strategis-menuju-mimika-maju/



Kunjungi Kesbangpol, Komisi I DPRK Mimika Bahas Empat Pilar Kebangsaan



Menjalankan fungsi pengawasan, Komisi I DPRK Mimika mengunjungi Kesbangpol di kantor pusat pemerintahan, Jalan Cenderawasih, SP 3 Rabu (7/5).

Komisi I yang membidangi bagian hukum, pemerintahan dan HAM disambut oleh kepala badan Kesbangpol, Yan Slamet Purba beserta staff di ruang rapat Kesbangpol Mimika.

Kepala Kesbangpol memaparkan pentingnya empat pilar kebangsaan untuk disosialisasikan secara masif. Lebih lanjut la menyampaikan anggaran yang dikelola oleh Kesbangpol sekitar Rp. 77,8 Miliar diantaranya, Rp. 42 M untuk hibah lembaga, Rp.1,9 Miliar untuk bantuan dana Partai politik.

Adapun program utama dari Kesbangpol terkait empat pilar kebangsaan, yaitu pertama ideologi kedua wawasan kebangsaan ketiga bidang politik keempat bidang penanganan konflik.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/kunjungi-kesbangpol-komisi-i-dprk-mimika-bahas-empat-pilar-kebangsaan/

Komisi I DPRK Mimika Dan Bagian Tapem Bahas Hal Krusial Terkait Tapal Batas

Komisi I DPRK Mimika mengunjungi bagian Tata Pemerintahan (TAPEM) Sekretariat Daerah Mimika di kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Rabu (7/5/2025).

Pada kesempatan tersebut komisi I dan Tapem membahas hal yang selama ini masih menjadi polemik antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten tetangga terkait Tapal Batas.

“Kita Komisi I melakukan kunjungan di Tata Pemerintahan (TAPEM) ada beberapa hal, tapi ada satu hal yang sekiranya krusial, kemudian menjadi konsen Komisi I kedepannya yaitu Tapal Batas, ada dua kabupaten yang tapal batasnya belum clear, yaitu kabupaten Dogiyai dan kabupaten Deiyai, Oleh karena itu kita akan melakukan kajian kajian dan langkah langkah yang kita ambil bersama sama dengan pemda untuk menclearkan Terkait tapal batas ini” kata Ketua Komisi I DPRK Mimika Alfian Akbar Balyanan, SH.

Ketua Komisi I Alfian Akbar Balyanan mengatakan seperti yang disampaikan oleh Kabag TAPEM bahwa ada peta konflik yang dikeluarkan oleh kemendagri yang mencaplok wilayah administrasi Kabupaten Mimika, Oleh karena itu peta konflik ini perlu kita tinjau kembali dan juga kita luruskan kembali tapal batas atau wilayah administrasi berdasarkan UU terkait dengan pemekaran Kabupaten Mimika.

Selain tapal batas, Teman teman juga mendorong kiranya pemekaran wilayah kampung maupun distrik untuk pemekaran kampung itu merupakan domain dari DPMK sehingga nanti DPMK yang melakukan kajian. Sementara Terkait dengan pemekaran kelurahan distrik tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kabag merupakan domain dari TAPEM, sehingga TAPEM akan melakukan kajian kajian untuk pemekaran di wilayah Distrik dan Kelurahan.

Selain itu, TAPEM juga menyampaikan bahwa berdasarkan arahan dari Bupati agar dilakukan kajian pemekaran dua kabupaten, Yakni Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat dan satu Kota Madya dan itu TAPEM akan datang berkonsultasi dengan DPR untuk meminta dukungan dalam rangka sesuai arahan bupati.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/komisi-i-dprk-mimika-dan-bagian-tapem-bahas-hal-krusial-terkait-tapal-batas/





Kunjungan Pengawasan Komisi I Ke BKPSDM Pemkab Mimika

Komisi I DPRK Mimika Menyambangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang terletak di jalan SP5, Kamis (8/5/2025).

Rombongan Komisi I Dipimpin ketua, Alfian Akbar Balyanan, Wakil Ketua Daud Bunga, SH, Anthon Alom, Ester Rika Komber, Iwan Anwar, SH, Anton Pali, SH, Agustinus Murib. Turut dihadirkan oleh Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau.

Komisi I diterima oleh Kepala Badan BKPSDM ibu Hermalina W. Imbiri, SE.M.Si beserta para kabid dan staf diruang rapat BKPSDM.

Ibu Hermalina memaparkan program yang saat ini dikerjakan oleh BKPSDM diantaranya Tes CPNS Honorer Tahap I, dan proses pengumuman penetapan NIP untuk guru PPPK.

Di BKPSDM terdapat tiga bidang program yaitu bidang pertama pengobatan dan promosi, bidang pengadaan sampai pensiun, dan bidang pengembangan aparatur. Untuk pagu anggaran BKPSDM tahun 2025 sebesar Rp. 31,2 M, belanja operasional pegawai Rp.14 M, untuk belanja kegiatan, Rp. 16 Miliar.

Untuk tes CPNS sudah sementara dalam tahap pengisian biodata, daftar riwayat hidup.

Untuk pendaftar CPNS secara keseluruhan dari 847 formasi, terdiri dari pelamar Orang Asli Papua (OAP) 3.313 orang, Non OAP 2.615 orang, jumlah semua pelamar 5.933. Sedangkan yang lulus sebanyak 532 orang terdiri dari OAP 405, dan non OAP 127 orang, ada juga yang tidak ada pelamar sebanyak 315 formasi.

Sedangkan PPPK Guru berjumlah 483 semua sudah diinput di aplikasi dan sementara dalam proses Penandatanganan Pertek dari kepala BKN.

Untuk SK Tenaga Kesehatan sudah ditandatangani sebanyak 1.418 SK, sisanya sebanyak 18 masih menunggu tandatangan dari mantan Bupati, Eltinus Omaleng, yang kabarnya masih berobat keluar negeri.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/kunjungan-pengawasan-komisi-i-ke-bkpsdm-pemkab-mimika/

Kunjungan Pengawasan Komisi I Ke Bagian Hukum Setda Pemkab Mimika



Komisi I DPRK Mimika mengunjungi Bagian Hukum Setda Mimika, di kantor pusat pemerintahan, jalan Cenderawasih, SP 3, Kamis (8/5).

Komisi I Dipimpin ketua Komisi, Alfian Akbar Balyanan, SH, Wakil Ketua Daud Bunga, SH, Anthon Alom, Ester Rika Komber, Iwan Anwar, SH, Anton Pali, SH, Agustinus Murib. Turut dihadirkan oleh Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau.

Rombongan Komisi I diterima langsung Kabag Hukum, Muh. Jambia Wadah Sao, SH beserta staf, pertemuan langsungkan diruang rapat kantor bagian hukum.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/kunjungan-pengawasan-komisi-i-ke-bagian-hukum-setda-pemkab-mimika/

Hasil Kunjungan Komisi I, Distrik Miru Dipersiapkan Jadi Kota Madya

Distrik Mimika Baru (Miru) dipersiapkan jadi Kota Madya, hal ini terungkap saat kunjungan Komisi I DPRK Mimika ke kantor Distrik Miru, Jalan Cenderawasih Timika, Jumat (9/5/2025).

Rombongan Komisi I dipimpin ketua, Alfian Akbar Balyanan, SH, Wakil Ketua Daud Bunga, SH, Anthon Alom, Ester Rika Komber, Agustinus Murib, dan Frederikus Kemaku. Komisi I disambut oleh Kepala Distrik Miru, Joel Daniel Luhukay, beserta staf di ruang rapat Distrik.

"Distrik Miru ini akan dipersiapkan menjadi Kotamadya, maka seluruh pengelolaan dan pelayanan pemerintahandi Distrik Mimika Baru ini harus lebih profesional dibanding Distrik lainnya" Kata Ketua Komisi I Alfian Akbar Balyanan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa nanti Distrik Miru akan menjadi satu kota madya tersendiri yang kemudian harus menjadi contoh bagi ibu kota kabupaten-kabupaten lain yang akan dimekarkan di Kabupaten Mimika ini, karena itu seluruh aspek harus sudah kita persiapkan, mulai dari pengelolaan sampah, Database, maupun pelayanan harus kita persiapkan dengan baik.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/hasil-kunjungan-komisi-i-distrik-miru-dipersiapkan-jadi-kota-madya/



Mengawal Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Berangkat dari visi-misi Bupati Mimika untuk melaksanakan agenda reformasi birokrasi sudah sampai pada tahap penyusunan bahkan sejumlah kebijakan telah mulai dilaksanakan.

Hal ini ditandai dengan kebijakan Bupati untuk melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) juga kebijakan untuk melakukan seleksi terbuka bagi jabatan esolon II dan terhadap esalon III dan IV Bupati diharuskan untuk mengikuti assesmen.

Maka dalam rangka mengoptimalisasi rencana aksi yang digulirkan. Untuk itu, DPRK perlu memainkan peran strategis untuk mengawal agenda reformasi birokrasi tersebut. Mulai dari penataan birokrasi (restrukturisasi), proses seleksi, sampai dengan penempatan jabatan. Hal ini semata demi memberi penguatan kepada Bupati Mimika dalam aspek pengawasan.

Besar harapan agar agenda reformasi birokrasi ini dapat terealisasi sebagaimana harapan kita semua. Sehingga melalui penguatan kelembagaan pemerintahan. Maka kita dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan optimal.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/mengawal-rencana-aksi-reformasi-birokrasi/



Terkait Dugaan Praktik Monopoli Proyek Pemerintah, Ini Tanggapan Anggota DPRK Mimika Alfian Akbar Balyanan, SH

Menanggapi adanya dugaan praktik monopoli proyek Pemerintah yang dilakukan oleh oknum kontraktor di kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar perlu dibentuk Satgas Antimonopoli Proyek oleh Pemerintah. Terlebih pada saat ini dimana pemerintah tengah melakukan lelang terhadap proyek dan kegiatan untuk APBD Mimika tahun 2025.



"Satgas Antimonopoli ini diharapkan dapat bekerja untuk mendeteksi berbagai modus kecurangan yang dilakukan oleh kontraktor, dengan upaya kongkalikong bersama panitia lelang. Adanya praktik monopoli sangat sarat akan dugaan gratifikasi dan korupsi bahkan sangat menciderai rasa keadilan terhadap akses ekonomi bagi pelaku bisnis penyedia jasa kontraktor,"tegas Alfian Akbar Balyanan,SE melalui pesan singkatnya whatshapnya pada, Sabtu (8/3/2025).

Sebelumnya, pada saat Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito menjabat sebagai Pj. Bupati, ia sudah sudah berkomitmen untuk mencegah adanya upaya 'cawe-cawe' yang dilakukan oleh oknum ASN dalam mengatur proyek penunjukan langsung.

"Sayangnya, sebelum upaya beliau lakukan, ia sudah diganti oleh Penjabat Bupati yang baru yakni Bapak Yonathan Damme,"cetusnya.

Oleh karena itu, politisi muda yang juga adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mimika ini, sangat menaruh harapan besar kepada Pj. Bupati saat ini, apalagi sebelumnya beliau merupakan Direktur dilembaga antirasuah KPK, sehingga besar harapan beliau dapat memimpin orkestrasi pemberantasan korupsi di Kabupaten Mimika.

"Terlebih sebagai Pj. Bupati beliau merupakan 'decision makker' yang dapat mengambil tindakan konkret untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Mimika,"tutur Alfian.

Menurutnya, praktik monopoli yang dilakukan oleh oknum kontraktor ini sudah sejak lama dilakukan bahkan hal ini telah diketahui secara luas oleh publik. Namun sayangnya tidak mendapat respon yang baik oleh Pemerintah. Untuk itu, Pj. Bupati perlu mengambil tindakan tegas guna melakukan pencegahan dan pengawasan yang komprehensif demi memastikan terwujudnya persaingan usaha yang sehat di Kabupaten Mimika.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/terkait-dugaan-praktik-monopoli-proyek-pemerintah-ini-tanggapan-anggota-dprk-mimika-alfian-akbar-balyanansh/



Komisi I DPRK Mimika Dorong Sinergi Satpol PP dan Bagian Hukum untuk Efektivitas Perda

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyoroti pentingnya sinergi yang lebih erat antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bagian Hukum Setda dalam penegakan serta penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda). Isu ini menjadi fokus dalam Rapat Kerja yang digelar pada Kamis, 12 Juni 2025, di ruang Komisi I DPRK Mimika.

Ketua Komisi I, Alfian Akbar Balyanan, menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara kedua instansi ini sangat krusial. Menurutnya, Bagian Hukum berperan sebagai perancang dan penyusun produk hukum daerah, sedangkan Satpol PP bertugas memastikan aturan tersebut dijalankan di lapangan.

“Proses legislasi harus berjalan dari hulu ke hilir secara terpadu. Tanpa dukungan anggaran dan koordinasi lintas instansi, Perda hanya akan menjadi dokumen mati tanpa manfaat nyata,” ujar Alfian.

Alfian juga menyoroti lemahnya sistem sosialisasi Perda yang ada saat ini. Ia mendorong agar penyebaran informasi hukum kepada masyarakat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih modern, termasuk melalui media digital agar lebih mudah diakses publik.

Muh Jambia, Kepala Bagian Hukum Setda Mimika, mengakui bahwa komunikasi yang minim dari OPD pengusul kerap menjadi hambatan dalam penyusunan Raperda. Ia menilai perlu ada mekanisme baru yang mampu mempercepat dan menyederhanakan proses legislasi.

Di sisi lain, Iwan Anwar, anggota Komisi I sekaligus Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), menekankan pentingnya evaluasi terhadap lebih dari 250 Perda yang telah disahkan. Ia menyarankan agar dilakukan pengkajian menyeluruh untuk menentukan mana yang masih relevan dan mana yang sudah perlu dicabut atau direvisi.

“Contohnya, Perda Pelarangan Miras. Ini perlu ditinjau ulang. Kita dorong pendekatan pengaturan yang lebih realistis, bukan sekadar larangan,” ujarnya.

Iwan juga menyoroti besarnya anggaran pembuatan satu Perda yang mencapai Rp 300 juta, sehingga ia menekankan perlunya seleksi ketat terhadap setiap usulan regulasi baru.

Sementara itu, Anton Pali, SH, Sekretaris Komisi I, mengkritik lemahnya penegakan aturan oleh Satpol PP, terutama terkait maraknya pedagang liar di area terlarang.

“Satpol PP tak boleh ragu. Jika ada pelanggaran, beri sanksi tegas. Tapi sosialisasi tetap harus dijalankan agar masyarakat paham aturan,” tegasnya.

Dari pihak Satpol PP, La Ibrahim, salah satu Kepala Bidang, mengungkapkan bahwa pelaksanaan tugas di lapangan kerap menemui hambatan, terutama akibat rendahnya kesadaran masyarakat.

“Saat menegur warga soal sampah, kami sering mendapat perlawanan, bahkan nyaris bentrok. Ini menunjukkan bahwa edukasi hukum masih sangat kurang,” ungkapnya.

Komisi I menilai berbagai kendala ini berakar pada minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan dan pengawasan Perda. Karena itu, DPRK meminta kedua OPD menyusun anggaran yang detail dan sesuai kebutuhan—mulai dari sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga digitalisasi akses hukum.
Komisi I menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas regulasi daerah. Perda yang disahkan tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi harus diterapkan secara nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/komisi-i-dprk-mimika-dorong-sinergi-satpol-pp-dan-bagian-hukum-untuk-efektivitas-perda/

Dewan Puji Kinerja Kejaksaan, Desak Polisi Transparan Ungkap Kasus Jembatan Tembagapura



Komisi I DPRK Mimika memberikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua yang berhasil mengusut tuntas dugaan kasus korupsi pembangunan venue aerosport di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dalam kasus tersebut, Kejati Papua telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Belyanan, pada Selasa, 24 Juni 2025, menyatakan bahwa langkah tegas ini menjadi bukti nyata keseriusan Kejati Papua dalam menegakkan hukum. “Sangat luar biasa. Ini membuktikan komitmen Kejati dalam memberantas korupsi. Kami sangat mengapresiasi,” ujarnya.

Ia berharap kasus ini segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk disidangkan secara terbuka dan transparan.

Kejari Mimika Juga Tuai Apresiasi.Apresiasi juga diberikan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika atas penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan di Distrik Agimuga. Penyelidikan tersebut telah menemukan titik terang, dengan ditetapkannya dua orang sebagai tersangka.

“Penyelamatan uang negara oleh Kejari Mimika patut diapresiasi. Kami sampaikan terima kasih atas dedikasi mereka,” kata Ketua Komisi I DPRK Mimika.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses hukum, agar masyarakat dapat mengikuti dan mengawasi jalannya penanganan perkara. “Informasi yang tidak bersifat rahasia harus disampaikan ke publik melalui media,” tambahnya.

Ketua Komisi I DPRK Mimika turut menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Kampung Kimbely dan Kampung Pertanian di Distrik Tembagapura, yang saat ini masih ditangani oleh Polres Mimika.

Ia berharap proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan terbuka. “Masyarakat berhak tahu sejauh mana langkah-langkah yang sudah diambil aparat penegak hukum,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Ketua Komisi I DPRK Mimika mengingatkan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran. Ia menyarankan agar semua kegiatan pembangunan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Kerja sama antara pengguna anggaran dan APH sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan. Ini langkah preventif yang harus menjadi kebiasaan dalam tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Sumber: https://salampapua.com/2025/06/dewan-apresiasi-kinerja-kejaksaan-dan-minta-polisi-transparan-penyelidikan-kasus-jembatan-di-tembagapura.html

Komisi I DPRK Mimika RDP Bahas Dana Hibah dan Evaluasi Pemilu

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika, di ruang Rapat DPRK Mimika, Kamis (26/6/2025)

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan.

Menurut Alfian, terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Agenda pertama yaitu monitoring penganggaran dana hibah yang disalurkan melalui Kesbangpol kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu Mimika.

“Tadi Bawaslu dan KPU sudah sama-sama menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hibah tersebut. Kami menilai, dengan dana yang ada, keduanya telah mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam menyukseskan tahapan-tahapan pemilu,” kata Alfian.

Agenda kedua dalam RDP ini adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dari sisi penyelenggaraan teknis. Dalam evaluasi tersebut, terungkap sejumlah persoalan yang perlu dibenahi ke depan, khususnya yang berkaitan dengan data pemilih.

“Masalah paling mendasar adalah soal data. Ini menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT), penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga perbedaan jumlah RT yang tercatat. Ketidaksesuaian data ini seringkali memicu persoalan teknis di lapangan, seperti kesalahan penempatan TPS,” jelas Alfian.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dan pemutakhiran data kependudukan secara menyeluruh agar pelaksanaan pemilu di masa mendatang bisa berjalan lebih baik dan minim persoalan.

Komisi I DPRK Mimika juga mendorong agar evaluasi ini ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret oleh semua pihak terkait, demi mewujudkan pemilu yang lebih transparan, akurat, dan partisipatif di Mimika.

Sumber: https://papua60detik.id/berita/komisi-i-dprk-mimika-rdp-bahas-dana-hibah-dan-evaluasi-pemilu



Ketua Komisi I DPRK Mimika Dukung Penyebar-luasan Perda dan Tunjangan bagi Penegak Perda



Timika, 7 Juli 2025 – Ketua Komisi I DPRK Mimika Alfian Akbar Balyanan memberikan apresiasi kepada Pemkab Mimika yang tengah berupaya meningkatkan intensifikasi Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah.

Hal ini sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui kegiatan Deteksi dini, Pengawasan dan Penindakan Peraturan Daerah. Tentu melalui kerjasama dan kolaborasi bersama OPD teknis pengusung perda dan stakeholders lainnya.

Dalam keterangannya Alfian Akbar Balyanan mengatakan, “Kami mendukung upaya insentifikasi yang dilakukan Satpol PP ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti pengelolaan sampah, keamanan dan ketertiban masyarakat dan lainnya”.(Ujar Akbar sapaan akrab Alfian Akbar Balyanan ini)

Lebih lanjut Akbar menjelaskan bahwa Komisi I DPRK Mimika tengah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Penyebarluasan Peraturan Daerah, yang diharapkan dapat menjadi payung hukum eksekutif dan legislatif agar secara intensif melakukan sosialisasi dan penyebarluasan perda.

“Iya, kami mendorong Ranperda Penyebarluasan Perda ini dengan harapan agar sosialisasi, penyebarluasan dan penyuluhan Perda bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas Satpol PP tetapi seluruh stakeholders terutama DPRK sebagai lembaga yang melahirkan Perda juga harus bertanggungjawab dalam sosialisasi dan penyebarluasan perda ini kepada masyarakat”. (terang akbar)

Disamping itu, Akbar juga menyoroti tentang pentingnya implementasi penegakan perda. Sejalan dengan itu, ia juga mendorong perlu adanya tunjangan resiko bagi Satpol PP selaku instansi yang bertugas untuk menegakan perda.

“Kami berharap agar Pemkab Mimika perlu memperhatikan kesejahteraan personil Satpol PP yang telah bekerja keras dalam upaya menegakkan perda, untuk itu perlu adanya tunjangan resiko guna menjamin keselamatan dan kesejahteraan personil Satpol PP.

Seperti diketahui bahwa tunjangan resiko telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 221 Tahun 2024 Tentang Besaran Tunjangan Resiko dan Insentif Tambahan Satpol PP Kabupaten Mimika. Namun hal ini belum teralisasi oleh karena belum terakomodir dalam anggaran APBD.

Oleh karenanya Akbar berharap agar dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini, hal tersebut dapat dimasukan dalam penganggaran.“Kami berharap agar (tunjangan resiko) dapat diakomodir dalam penyusunan APBD Perubahan 2025 ini”. Ungkap Akbar singkat.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/ketua-komisi-i-dprk-mimika-dukung-penyebarluasan-perda-dan-tunjangan-bagi-penegak-perda/

Komisi I DPRK Kunker ke Staf Ahli Bupati, Soroti Lambannya Pemekaran



Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Kamis (17/07/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK terhadap kinerja Staf Ahli Bupati, khususnya terkait isu strategis pemekaran daerah dan pembinaan partai politik. Rombongan Komisi I DPRK Mimika dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Alfian Akbar Balyanan. Turut mendampingi, Sekretaris Komisi I Anton Palli serta anggota Ester Rika Agustina Kimber, Iwan Anwar, dan Anton Alom.

Dalam keterangannya, Alfian Akbar menegaskan bahwa fokus utama kunjungan kali ini adalah mengevaluasi capaian kerja para Staf Ahli Bupati pada bidang-bidang strategis. Terdapat dua isu yang menjadi sorotan, yakni lambannya realisasi pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tingkat kabupaten, distrik, dan kampung, serta pentingnya penguatan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada partai politik.

Pada pertemuan tersebut, Komisi I meminta penjelasan langsung dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Septinus Timang, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Komisi I menilai, proses pemekaran wilayah di Mimika berjalan lamban sehingga mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim pemekaran dan memastikan adanya keterlibatan DPRK dalam perumusan konsep pemekaran ke depan. “Pemekaran wilayah harus mengutamakan kepentingan masyarakat asli Papua. Prinsip itu yang akan terus kami kawal,” tegas Alfian.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Bappeda dan Tata Pemerintahan (Tapem) yang hadir menyatakan komitmennya untuk segera memaparkan hasil kajian terbaru mengenai rencana pemekaran. “Kajian tersebut telah kami sinkronkan dan Tapem akan terus berkoordinasi dengan Bappeda untuk memastikan langkah selanjutnya,” kata Alfian.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Septinus Timang, mengapresiasi kunjungan Komisi I DPRK Mimika dan menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti sebagai bahan laporan kepada Bupati Mimika.

“Berbagai rekomendasi yang kami terima akan menjadi catatan penting untuk kami laporkan ke Bupati. Ini akan menjadi dasar bersama agar sinkronisasi program dan realisasi kegiatan dapat berjalan optimal,” ujar Septinus.

Dengan kunjungan ini, Komisi I DPRK Mimika menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/komisi-i-dprk-sidak-ke-staf-ahli-bupati-desak-percepatan-pemekaran-wilayah/



Komisi I DPRK Mimika Terima Pemaparan Program Bank Sampah dari Distrik Miru

Komisi I DPRK Kabupaten Mimika melakukan kunjungan kerja ke Distrik Mimika Baru pada Kamis (17/07/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2025.

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, didampingi anggota Komisi I, yakni Ester Rika Agustina Kimber, Iwan Anwar, dan Anton Alom. Alfian Akbar menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini menjadi bahan evaluasi penting yang akan dibahas dalam rapat perubahan anggaran mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Daniel Luhukay, memaparkan sejumlah program prioritas dengan total anggaran lebih dari Rp30 miliar. Beberapa program yang sedang dijalankan di antaranya penanganan stunting serta inovasi pengelolaan sampah melalui pendirian bank sampah.

Program bank sampah ini dinilai sebagai langkah efektif untuk mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Melalui program ini, sampah rumah tangga akan dijemput langsung oleh petugas, kemudian masyarakat diminta untuk memilah sampah yang memiliki nilai jual. Sampah tersebut akan dibeli oleh pihak distrik dengan harga yang disesuaikan dengan harga pengepul.

Selain bermanfaat bagi kebersihan lingkungan, program ini juga diharapkan dapat menambah penghasilan masyarakat. Tidak hanya itu, Distrik Mimika Baru juga merekrut warga setempat sebagai petugas bank sampah dengan upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) serta dilengkapi jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Setelah mendengar paparan tersebut, Komisi I DPRK Mimika menilai alokasi anggaran Distrik Mimika Baru masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya.

“Kami melihat Distrik Mimika Baru memiliki populasi terbesar dan wilayah yang luas, sehingga kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terkait penambahan anggaran,” ujar Alfian Akbar.

“Program ini sangat bagus, tetapi dengan anggaran yang tersedia saat ini baru mampu membangun tiga pos bank sampah. Kami berharap ke depan jumlahnya dapat ditambah agar cakupannya lebih luas,” tutup Alfian.

Sumber: https://papua60detik.id/berita/distrik-miru-paparkan-program-bank-sampah-ke-komisi-i-dprk-mimika

Komisi I DPRK Mimika Kunker ke Distrik Iwaka, Dorong Percepatan Normalisasi DAS

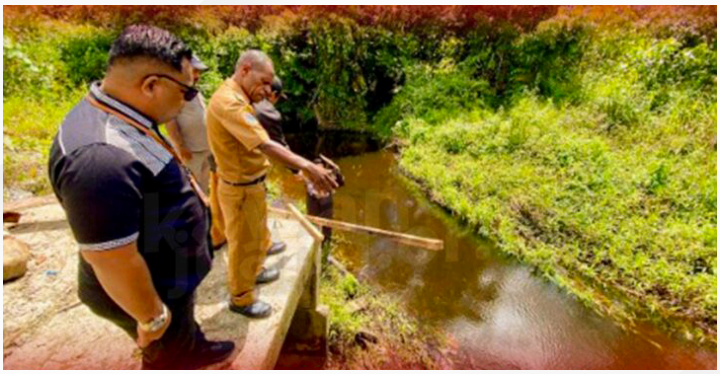

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, pada Senin (21/7/2025). Kunjungan ini fokus membahas berbagai persoalan mendesak, salah satunya normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.

Kegiatan kunker dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, didampingi Wakil Ketua Daud Bunga, Sekretaris Anthon Pali, serta anggota Anton Alom, Iwan Anwar, Ester Komber, dan Agustinus W. Murip.

Setelah melakukan rapat koordinasi di kantor Distrik, rombongan dewan bersama Kepala Distrik Iwaka dan para kepala kampung turun langsung meninjau kondisi DAS di Kampung Limau Asri Timur.

Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, mengungkapkan bahwa peninjauan ini menemukan saluran air yang tersumbat oleh material sisa pekerjaan jembatan, sehingga berpotensi memperparah banjir di musim hujan.

“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, kami akan mendorong pemerintah untuk segera melakukan normalisasi sungai. Tujuannya agar banjir tidak terus berulang, mengingat daerah ini memang rawan tergenang air,” ujar Alfian.

Sementara itu, Kepala Distrik Iwaka, Linus Dolame, menegaskan bahwa Distrik Iwaka memiliki peran strategis bagi pembangunan di Mimika. Selain menjadi sumber material tambang galian C, wilayah ini juga menghasilkan bahan pangan dari sektor perkebunan dan pertanian. Namun, Linus juga menyoroti keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memerlukan perhatian serius.

“Wilayah Distrik Iwaka ini sangat vital. Material pembangunan diambil dari sini, sampah pun dibuang ke sini. Jadi memang perlu penanganan khusus,” kata Linus.

Ia menambahkan, sejumlah kebutuhan mendesak seperti pembangunan rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP), pembangunan kantor distrik yang representatif, serta kantor Polsek dan Koramil juga perlu segera direalisasikan guna meningkatkan keamanan dan pelayanan publik.

Linus membeberkan, anggaran Distrik Iwaka tahun ini turun menjadi sekitar Rp8 miliar dari sebelumnya Rp9 miliar per tahun, dengan total pengelolaan anggaran selama tiga tahun terakhir mencapai Rp27 miliar.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRK Mimika, Daud Bunga, menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pihak distrik dengan DPRK agar permasalahan yang sudah bertahun-tahun ini dapat ditindaklanjuti.

“Banyak aspirasi ini sebenarnya sudah diusulkan sejak lama, tetapi pelaksanaannya terhambat. Kami minta pihak distrik lebih aktif berkoordinasi dengan DPRK supaya bisa kami dorong dalam pembahasan anggaran,” ujar Daud.

Anggota Komisi I, Anthon Pali, juga menyoroti kondisi pemukiman di Distrik Iwaka yang tidak layak huni dan rawan banjir. Ia meminta data warga yang membutuhkan rumah layak huni segera dilengkapi agar bisa diperjuangkan ke pemerintah. “Data warganya harus rapi, supaya bisa diajukan pembangunannya,” tegas Anthon.

Selain itu, Anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat, Ester Komber, menambahkan bahwa persoalan banjir juga disebabkan oleh penebangan pohon ilegal di sekitar aliran sungai. “Penebangan liar ini harus ditertibkan karena memperparah banjir,” kata Ester.

Menutup kunjungan kerja tersebut, Ketua Komisi I DPRK Mimika memastikan seluruh masukan dan temuan di lapangan akan dibawa ke pembahasan perubahan anggaran maupun APBD induk tahun 2026. “Apa yang menjadi prioritas akan kami perjuangkan dan sampaikan ke pemerintah daerah agar segera ditindaklanjuti,” pungkas Alfian.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/komisi-i-dprk-mimika-kunker-ke-distrik-iwaka-dorong-percepatan-normalisasi-das/

Alfian Akbar Balyanan Gelar Reses Lintas RT Di Kelurahan Kebun Sirih, Warga Usulkan Peningkatan Jalan Hingga Pelatihan Skill Bagi Pemuda



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Mimika, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Alfian Akbar Balyanan,SH menerima sejumlah aspirasi dan usulan dari warga yang tergabung dalam lintas RT se Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru , kabupaten Mimika dalam kegiatan Reses Tahap Pertama tahun 2025 yang digelar di Kebun Sirih, Timika, Jumat (21/3/2025).

Turut hadir dalam kegiatan reses, adalah Plt Lurah Kebun Sirih Faustina Endang Suryanti, Ketua-ketua RT, tokoh masyarakat dan pemuda serta warga Kebun Sirih lainnya.

Adapun aspirasi yang diterima anggota DPRK Mimika Alfian Akbar Balyanan dari warga dalam reses tersebut meliputi soal, peningkatan Jalan menuju Perumahan Lanal untuk diaspal, Soal Drainase dan parit, Penerangan lampu Jalan, Pembangunan Kantor Baru Kelurahan Kebun Sirih, Pengaktifan Pos Peka dalam rangka mencipatak Kamtibmas, hingga mendirikan Balai latihan Kerja (BLK) untuk mengasah skill generasi muda untuk bekal mencari pekerjaan.

Alfian Akbar Balyanan,SH ditemui redaksi taparemimika.com , Jumat (21/32025) usai menggelar reses dikediamannya di Kebun Sirih Timika menuturkan, dari hasil reses tahap pertama dengan bertemu dengan warga dari lintas RT di Kelurahan Kebun Sirih, beberapa aspirasi yang disampaikan warga, bersifat usulan dan aspirasi.

“Dalam usulan dan aspirasi tadi beberapa hal seperti pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan akan menjadi prioritas kedepan, khusus untuk jalan dari Gorong-gorong menuju Perumahan Lanal meminta untuk diaspal biar mempermudah aktifitas warga. Hal ini akan jadi atensi dan berjanji akan diperjuangkan,”ungkap Alfian.

Sedangkan untuk Pembangunan Kantor Baru Kelurahan Kebun Sirih yang diusulkan oleh Plt Lurah Kebun Sirih Ibu Endang, sementara sedang mencari lahan untuk nanti menjadi lokasi pembangunan Kantor Baru Lurah Kebun Siri.

“DPRK Mimika pasca pelantikan dalam perjalanan masih proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (ADK) yaitu komisi-komisi, sehingga nantinya kalau sudah terbentuk dalam hal ini Komisi I yang membidangi Pemerintah akan menjadi atensi dan berusaha mendorong sehingga kantor Lurah kebun Sirih bisa dibangun. Termasuk sarana dan prasarana kantor Lurah baru juga akan diperjuangkan,”jelas Alfian.

Begitu juga dengan Penerangan lampu Jalan dan pengaktifan Pos Peka demi menciptakan Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Kamtibmas), ini akan menjadi atensi DPRK untuk nantinya berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini kepolisian. Sebab dengan adanya pos Peka dan penerangan lampu jalan dapat menekan kasus-kasus kriminal.

“Kalau Pos Peka diaktifkan lagi ini sangat bagus, kami juga dapat mendorong bila dibutuhkan berdirinya pos-pos kamling baru demi memberikan rasa aman kepada warga yang ada di Kelurahan Kebun Sirih,” sebutnya.

Sumber: https://taparemimika.com/index.php/2025/03/21/alfian-akbar-balyanan-gelar-reses-lintas-rtdi-kelurahan-kebun-sirih-warga-usulkan-peningkatan-jalan-hingga-pelatihan-skill-bagi-pemuda/

Reses Tahap I, (Hari ke 2) Alfian Balyanan Jaring Aspirasi Wartawan



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Alfian Akbar Balyanan, SH menggelar Reses Tahap I, dengan menjaring aspirasi wartawan Timika, yang dilaksanakan di Sekretariat PDIP, Sabtu (22/03/2025).

Dalam reses tersebut, salah satu wartawan, Aniz meminta adanya ruangan bagi media di Pusat Pemerintahan (Puspem) maupun di DPRK. Selama ini wartawan yang meliput di Puspem maupun di DPRK tidak mendapatkan tempat. “Kalau bisa kita diberikan ruangan sebagai pusat untuk media, selama ini kita hanya duduk di kantin bahkan di Puspem kita hanya duduk di koridor,” ujarnya.

Selanjutnya, wartawan lainnya, Markus mempertanyakan adanya kerjasama antara media dengan pemerintah seharusnya bisa menjadi perhatian khusus mengingat media bisa berkembang dengan adanya kerjasama
Menjawab pertanyaan wartawan, Alfian mengatakan bahwa media merupakan lumbung informasi untuk permasalahan yang ada di masyarakat, maupun di pemerintahan bahkan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga sudah seharusnya media perlu adanya kerjasama antara media dan pemerintah, agar dapat bersama-sama mengawal pembangunan di Mimika.

“Saya rasa untuk permintaan kerjasama ini memang harus kita dorong di Bagian Humas dan juga Kominfo, sehingga media di Mimika ini juga bisa berkembang dan terarah,” ucapnya.
Ia juga akan mendorong unyuk adanya peningkatan kompetensi wartawan di Timika, sehingga wartawan bisa lebih kritis dalam memberikan informasi dan keterangan kepada masyarakat.

“Semua aspirasi teman-teman akan saya sampaikan dan dorong, sehingga kompetensi wartawan bisa lebih meningkat,” pungkasnya.

Sumber: https://taparemimika.com/index.php/2025/03/22/reses-dengan-tatap-muka-bersama-wartawan-alfian-akbar-balyanan-peran-wartawan-sangat-strategis-dalam-pembangunan/

Alfian Akbar Balyanan Gelar Reses di Dingo Narama

Mimika, 24 Maret 2025 — Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan, melaksanakan kegiatan Reses Tahap I Tahun 2025 di Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru. Reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Alfian juga membuka ruang dialog terbuka dengan warga Dingo Narama. Berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari keluhan soal kondisi infrastruktur jalan, permintaan pelatihan keterampilan bagi pemuda, hingga penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kehadiran Alfian di tengah-tengah masyarakat Dingo Narama disambut antusias. Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda hadir dalam forum tersebut dan berharap aspirasi yang disampaikan.

Kegiatan reses ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Alfian ke tiga kelurahan di Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika 2, yaitu Kebun Sirih, Timika Indah, dan Dingo Narama, yang digelar pada 21 hingga 24 Maret 2025.

Melalui kegiatan ini, Alfian menegaskan pentingnya reses sebagai instrumen demokrasi yang bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi menjadi ruang strategis memperkuat hubungan antara rakyat dan wakilnya di parlemen.



Alfian Akbar Balyanan, Ketua Komisi I DPRK Mimika Pimpin Rapat Perdana, Bahas Terkait Agenda dan Jadwal

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Mimika, Provinsi Papua Tengah, Alfian Akbar Balyanan,SH pada Jumat (25/4/2025) siang memimpin rapat pertama Komisi I dengan agenda membahas jadwal dan agenda Komisi I yang membidangi Pemerintahan dan Hukum.

Rapat pertama bagi Komisi I DPRK Mimika ini dilaksanakan, di Ruang Rapat Komisi di Kantor DPRK Mimika lantai I ini.

Selain dihadiri oleh Ketua Komisi I, Alfian Akbar Balyanan, juga hadir Wakil ketua Komisi, Daud Bunga,SH, Sekretaris Komisi Anton Palli,SH serta tiga anggota lainnya, Ester Rika Agustina Komber, Anton N Alom, H. Iwan Anwar,SH,MH dan Frederikus Kemaku,SH.

Dari pantauan redaksi, Rapat Komisi I DPRK Mimika tersebut membahas sejumlah agenda seperti Hearing dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika, Kunjungan Kerja kelapangan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) hingga rencana pelaksanaan studi banding.

Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan,SE saat memimpin rapat menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota komisi I yang telah meluangkan waktu dan berkesempatan hadir dipertemuan awal Komisi I DPRK Mimika untuk bersama-sama menentukan agenda kerja komisi.

“Ini sebenarnya bukan rapat resmi, tapi ini bersifat diskusi dan cerita-cerita tentang agenda Komisi A kedepan pasca disahkannya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beberapa hari lalu. Karena ini merupakan awal pertemuan Komisi I, diharapkan kita semua bisa memberikan pendapatan dan masukan tentang agenda Komisi A setelah adanya jadwal dan agenda dari hasil Rapat Bamus kemarin. Kita saling melengkapi dan bersepakat agenda apa yang harus kita lakukan diawal tugas komisi-komisi saat ini,”ungkap Alfian.

Komisi I DPRK Mimika sendiri, dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang membidangi Pemerintahan dan Hukum bermitra dengan sejumlah OPD, Lembaga Negara, Institusi Negara,BUMN, Lembaga Adhoc, dan Partai-partai Politik diantaranya, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Bagian Tata Pemerintah Setda Mimika, Bagian Ortal, Bagian Humas dan Protokoler Setda Mimika, Bagian Umum dan Perengkapan Setda Mimika, Bagian Hukum Setda Mimika, Badan Kepegawaian dan Perlengkapan Mimika,

Insektorat Daerah, Kantor Imigrasi, Badan Kesbangpol Mimika, Lembaga Pemasyarakatan, Satpol PP Mimika, Badan Pertanahan Kabupaten Mimika, Distrik Iwaka, Distrik Mimika Baru, Distrik Alama, Dsirtik Mimika Timur Jauh, Dsitrik Mimika Timur, TNI-Polri, Pengadilan Negeri Timika, Kejaksaan Negeri Timika, Badan Narkotika Nasional, KPUD Mimika dan Bawaslu Mimika

Sumber: https://taparemimika.com/index.php/2025/04/25/alfian-akbar-balyanan-ketua-komisi-i-dprk-mimika-pimpin-rapat-perdana-bahas-terkait-agenda-dan-jadwal/



Kunjungan Komisi I DPRK Mimika Ke Distrik Mimika Timur, Wajah Mimika Dengan Berbagai Persoalan.



Ketua Komisi I DPRK Mimika Alfian Akbar Balyanan. menyampaikan bahwa langkah peninjauan langsung terhadap program dan kegiatan yang telah berjalan di Distrik Mimika Timur merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif.

“Ini adalah bagian dari fungsi pada fungsi pengawasan kami, sehingga kami perlu melakukan peninjauan secara langsung terhadap program kegiatan yg telah berjalan di distrik mimika timur, sehingga hal itulah menjadi dasar kami dalam melakukan penilaian apakah program kegiatan tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya ataukah perlu ada pembenahan-pembenahan, peningkatan-peningkatanyang perlu dilakukan untuk kemudian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, program-program yang dinilai penting dan berdampak langsung ke masyarakat harus diupayakan masuk dalam APBD, maupun diusulkan melalui program-program dari pemerintah pusat.

Sumber: https://www.timikabisnis.com/kunjungan-komisi-i-dprk-mimika-ke-distrik-mimika-timur-wajah-mimika-dengan-berbagai-persoalan/



Ketua Komisi I DPRK Mimika Alfian Akbar: Program 100 Hari Kerja Bupati Dan Wabup Mimika, Berdampak Positif pada Penataan Birokrasi

Seratus hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Mimika menjadi momentum awal untuk melakukan pembenahan birokrasi secara menyeluruh. Upaya ini dinilai sebagai langkah strategis agar program pembangunan berjalan lebih terarah dan langsung dirasakan masyarakat.

Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, mengungkapkan bahwa penataan birokrasi adalah kunci utama agar Mimika bisa bergerak maju. Ia menilai selama ini banyak program terhambat karena birokrasi berjalan di tempat.

“Tantangan terbesar pemerintah sekarang adalah membenahi birokrasi. Tanpa fondasi yang kuat, program apapun akan sulit terealisasi,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (24/7).

Dalam 100 hari pertama, sejumlah inovasi pelayanan publik mulai diperkenalkan untuk mempermudah akses masyarakat. Beberapa di antaranya adalah:

- Mimika Center, yang berfungsi sebagai pusat pengaduan masyarakat selama 24 jam.
- Mal Pelayanan Publik, mempersingkat waktu pengurusan administrasi kependudukan hanya dalam hitungan menit.
- Program Kesehatan SA ANTAR KO, yaitu layanan antar jemput pasien Orang Asli Papua (OAP) yang baru selesai dirawat di RSUD Mimika.

Langkah-langkah ini, kata Alfian, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.

“Kini warga tak perlu antre seharian hanya untuk satu dokumen. Semua serba cepat dan lebih tertib,” tuturnya.

Alfian juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi melalui perombakan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak tumpang tindih kewenangan. Selain itu, penempatan pejabat pun harus berdasarkan kompetensi, bukan sekadar kedekatan politik.

“Kalau pejabatnya profesional, maka kebijakan di lapangan juga lebih efektif. Kita tidak mau lagi ada program yang gagal hanya karena tidak ada koordinasi antarinstansi,” tegasnya.

Menurut Alfian, arah perubahan birokrasi Mimika mengikuti tiga unsur penting yang dijelaskan Lawrence Friedman, yaitu substansi, struktur, dan output.

Substansi berarti pembenahan regulasi dan kebijakan,
Struktur artinya pembenahan perangkat pelaksana,
Dan output adalah hasil nyata yang harus dirasakan langsung oleh warga.

“Hasilnya memang belum semua bisa dilihat sekarang. Tapi fondasinya sudah mulai terbentuk dengan baik. Ini jadi titik awal untuk perubahan Mimika ke arah yang lebih baik,” katanya.

Ia pun mengingatkan bahwa pembangunan harus dimulai dari dalam.

“Kalau birokrasi kuat, pelayanan dasar berjalan lancar. Baru setelah itu kita bicara program-program besar,” pungkas Alfian.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/ketua-komisi-i-dprk-mimika-alfian-akbar-program-100-hari-kerja-bupati-dan-wabup-mimika-berdampak-positif-pada-penataan-birokrasi/

Komisi I DPRK Mimika Kunker Bersama Tim DOB, Sinkronkan Persepsi Pemekaran Daerah Otonomi Baru

Komisi I DPRK Mimika menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) guna mendengarkan pemaparan hasil kajian rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah administratif Kabupaten Mimika. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Grand Tembaga pada Kamis (24/7/2025).

Hadir dalam agenda tersebut Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Ananias Faot, unsur Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), serta Tim Pemekaran DOB. Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, didampingi jajaran Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi I.

Dalam sambutannya, Alfian Akbar menjelaskan bahwa Kunker ini difokuskan pada sinkronisasi kajian pemekaran di tingkat kampung, kelurahan, distrik, hingga rencana pembentukan kabupaten/kota baru. Ia menekankan pentingnya aspirasi masyarakat sebagai dasar pemekaran.

Sementara itu, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menegaskan bahwa pemekaran wilayah menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan pelayanan publik, asalkan didukung persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. “Pemekaran jangan sampai memicu konflik di masyarakat. SDM harus siap agar tujuan utamanya, yaitu mendekatkan pelayanan, benar-benar tercapai,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi I, Daud Bunga, turut menyoroti lambannya progres tim teknis pemekaran meski sudah menelan anggaran tidak sedikit. Ia berharap diskusi ini menghasilkan solusi konkret. “Jangan sampai hanya jadi wacana tanpa hasil nyata,” ujarnya.

Senada, Anton Alom, anggota Komisi I, mengungkapkan optimismenya setelah melihat soliditas kerja antara Bappeda dan tim teknis. Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci agar Mimika Timur tidak kehilangan peluang menjadi DOB baru. “Kalau kita lengah, status kota madya bisa jatuh ke daerah lain. Ini momen kita untuk serius,” tandasnya.

Sekretaris Komisi I, Anton Pali, menekankan pentingnya integrasi hasil kajian antarinstansi agar tak terjebak ego sektoral. Ia mengingatkan pengalaman



kegagalan Mimika menjadi ibu kota provinsi di masa lalu akibat lemahnya koordinasi lintas lembaga.

Sementara itu, Iwan Anwar mengingatkan perlunya penentuan lokasi ibu kota DOB yang strategis dan mudah diakses. Menurutnya, aspek geografis dan transportasi harus menjadi pertimbangan utama. “Jangan sampai pemilihan lokasi justru mempersulit masyarakat,” katanya.

Ester Rika Komber juga mendorong agar kajian pemekaran mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dan keistimewaan yang relevan.

Dari Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur menyoroti pentingnya ketertiban administrasi kampung dalam rencana pemekaran. Ia menegaskan bahwa DOB tidak boleh dijadikan celah untuk mengejar Dana Desa semata.

Yulius Katagame, Koordinator Tim Pemekaran Mimika Timur, mengajak seluruh pihak bersatu mendukung percepatan pembentukan Mimika Timur dan Mimika Barat. “Kalau semua elemen sejalan, DOB ini bukan lagi mimpi,” ungkapnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Ananias Faot, juga menyoroti perlunya peran aktif Gubernur Papua Tengah untuk memfasilitasi sinkronisasi tapal batas antarwilayah. Ia berkomitmen merevisi SK Tim Tapal Batas yang dianggap tidak relevan lagi. “Batas wilayah bukan hanya peta. Ini menyangkut identitas masyarakat yang harus dijaga,” tuturnya.

Menutup pertemuan, Alfian Akbar menegaskan bahwa Komisi I DPRK Mimika akan terus mendorong pemerintah pusat memberikan afirmasi khusus, agar rencana pemekaran dapat segera terwujud dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran Komisi I DPRK Mimika: Alfian Akbar Balyanan, Daud Bunga, Anton Pali, Esterika Komber, Anton Alom, Agustinus Murib, Frederikus Kemaku, serta Ketua Komisi III Herman Gafur.

Sumber: https://kawanjuang.or.id/artikel/komisi-i-dprk-mimika-kunker-bersama-tim-dob-sinkronkan-persepsi-pemekaran-daerah-otonomi-baru/

Ketua Komisi I DPRK Mimika Apresiasi Pimpinan Bapemperda atas Disetujuinya Usulan Raperda Pelayanan Bantuan Hukum



Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika rapat koordinasi dan konsultasi bersama Kementerian Hukum Wilayah Papua, di Jayapura, Jumat (8/8/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menetapkan judul-judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRK Mimika Tahun 2025.

Ketua Komisi I DPRK Mimika yang juga selaku Anggota Bapemperda, Alfian Akbar Balyanan mengatakan, dalam rapat tersebut Bapemperda mengusulkan empat judul rancangan peraturan daerah, dimana dari keempat usulan tersebut salah satu Raperda yang disetujui untuk masuk dalam daftar prioritas yaitu Raperda tentang bantuan hukum.

“Saya sebagai anggota Bapemperda memberikan apresiasi kepada Pimpinan Bapemperda dan juga perancang peratuan perundang-undangaan dari Kementrian Hukum Wilayah Papua yang telah menyetujui Raperda tentang Bantuan Hukum dalam daftar Raperda prioritas. Tentunya saya berharap agar Raperda yang dilahirkan nantinya dapat terealisasi sebagaimana mestinya, sebab Raperda tentang bantuan hukum ini merupakan hal yang urgen dan prioritas,” ujar Alfian.

Alfian menjelaskan, saat ini banyak masyarakat kurang mampu memiliki keterbatasan dalam mengakses keadilan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Mimika melalui lembaga bantuan hukum perlu memberikan layanan bantuan hukum secara gratis guna mengadvokasi persoalan hukum bagi masyarakat baik melalui litigasi maupun non-litigasi.

“Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung program pelayanan bantuan hukum ini, sehingga lembaga-lembaga bantuan hukum dapat bekerja secara maksimal dalam melakukan pendampingan hukum baik litigasi maupun non- litigasi kepada masyarakat kurang mampu,” ujarnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh pihak Kementerian Hukum Wilayah Papua, bahwa untuk saat ini di Kabupaten Mimika baru satu lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi di Kementerian Hukum.

Oleh karena itu, diharapkan kedepan dengan ditetapkannya Raperda tentang pelayanan bantuan hukum ini, dapat memberikan motivasi kepada Pengacara, institusi penegak hukum dan pegiat hukum lainnya untuk dapat mendirikan lembaga bantuan hukum guna menjalankan dan meningkatkan program pelayanan bantuan hukum ini kepada masyarakat di Kabupaten Mimika,” tutup Alfian. (Joe Situmorang)

Sumber: https://papua60detik.id/berita/ketua-komisi-i-dprk-mimika-apresiasi-pimpinan-bapemperda-atas-disetujuinya-usulan-raperda-pelayanan-bantuan-hukum



Alfian Akbar Balyanan

Ketua Komisi I DPRD Kab. Mimika